



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Bandung, 28 Mei 2003

Nomor : 113/DEK-FISIP/UNIKOM/V/2003
Perihal : Kerja Praktek
Lampiran : -

Kepada Yth.
Bag. Humas
Pikiran Rakyat
Jl. Asia Afrika No.77
Bandung 40111

Dengan hormat.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia (FISIP UNIKOM), dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami berikut ini :

NO.	NIM	NAMA MAHASISWA	JURUSAN
1.	41800022	LUCKY DARMAWAN	ILMU KOMUNIKASI
2.	41800078	NURDIN	ILMU KOMUNIKASI
3.	41800091	A. FERRY YUNIAR	ILMU KOMUNIKASI

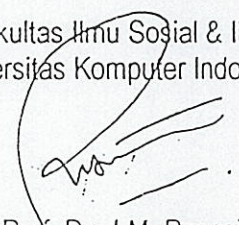
Untuk melaksanakan Kerja Praktek di Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Pelaksanaan Kerja Praktek mahasiswa/i FISIP UNIKOM tersebut akan dilaksanakan selama \pm 1 bulan dari tanggal 1 Agustus – 13 September 2003.

Demikian surat permohonan Kerja Praktek ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

a.n. Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia


Prof. Dr. J.M. Papasi
NIP. 4127.70.00.011

Tembusan :

1. Yth. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi
2. Arsip

Pikiran Rakyat

DARI RAKYAT - OLEH RAKYAT - UNTUK RAKYAT

TATA USAHA/
SIRKULASI/IKLAN: Jl. Asia Afrika No. 77
Telp. 4201634 (Hunting)
Fax. (022) 4204720
KOTAK POS : No. 1254
BANK : Bank Rakyat Indonesia
BPD Jabar Bandung
BANDUNG - INDONESIA

Nomor : 455/JOB/HMS-PR/VII/2003
Lamp :
Hal : JOB TRAINING

Kepada Yth.
Pemimpin Harian Redaksi
HU. Pikiran Rakyat
di
BANDUNG

Dengan Hormat,

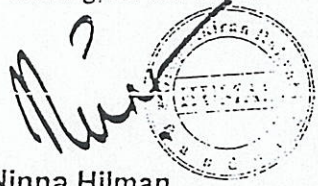
Memperhatikan surat dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia, No: 113/DEK-FISIP/UNIKOM/V/2003, tanggal 28 Mei 2003, perihal: Job Training di HU. **Pikiran Rakyat**, dengan ini diberitahukan bahwa :

NAMA	NIM/NRP	JURUSAN/PROGRAM STUDI
LUCKY DARMAWAN	41800022	ILMU KOMUNIKASI
NURDIN	41800078	ILMU KOMUNIKASI

Bermaksud melakukan Job Training di Bagian Redaksi HU. **Pikiran Rakyat** sehubungan dengan salah satu mata kuliah wajib yang diikutinya. Mengenai waktu serta pelaksanaannya kami serahkan sepenuhnya kepada Bagian Redaksi.

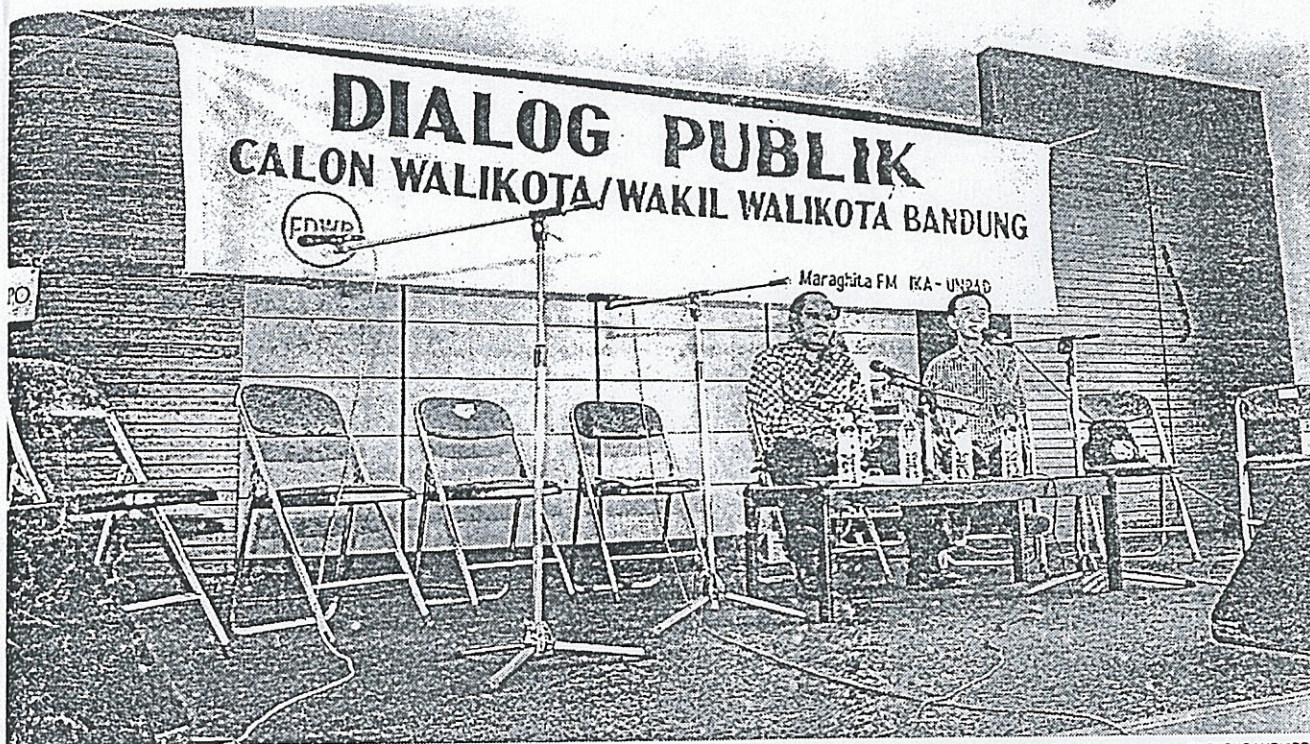
Demikian pemberitahuan ini. Terima kasih atas perhatiannya.

Bandung, 23 Juli 2003


Ninna Hilman
Kepala Humas & Protokoler
PT. **Pikiran Rakyat** Bandung

Tembusan:

- Yth, Kepala Bagian Personalia Grup Pikiran Rakyat
- Yth, Redpel Litbang Redaksi HU. Pikiran Rakyat
- Yth, Yang Bersangkutan
- Arsip



DUDI SUGANDI/PR

JEJERAN kursi kosong terlihat saat Wali Kota Bandung yang juga calon wali kota periode 2003-2008, Aa Tarmana (kiri) dan Ketua Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB) Sulhan Syafei (kanan) melakukan dialog pada acara Debat Publik Calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Bandung yang berlangsung di gedung IKA Unpad Jalan Dipatiukur Bandung, Kamis (4/9). Acara yang juga disiarkan langsung sebuah radio swasta tersebut tidak dihadiri calon lainnya.*

Pilwalkot Mesti Lahirkan Pemimpin Bersih

BANDUNG, (PR).-

Puluhan orang mengatasnamakan Konsorsium Warga Bandung untuk Demokrasi (Kowardem) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis (4/9). Mereka menuntut pilwalkot segera dilaksanakan DPRD Kota Bandung sesuai jadwal yang disepakati bersama dan tetap mengacu pada aturan main (tatib) yang telah disepakati, dan juga bebas dari *money politics*.

Karena pada saat bersamaan sedang berlangsung rapat panitia musyawarah (panmus) dan rapat panitia pemilihan (panlih), rombongan

pengunjuk rasa tidak diterima anggota dewan.

Dalam pernyataan sikapnya, Sekjen Kowardem, Yoseph Bachtar, mengharapkan, pilwalkot melahirkan kepemimpinan Bandung yang bersih serta memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan persoalan Kota Bandung yang sangat kompleks serta memiliki keberpihakan terhadap nasib rakyat banyak.

Selain itu, para kandidat harus bersaing secara sportif dan elegan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kejujuran, serta ke hormatan aturan yang ada. Sehingga

setiap partai politik harus menghormati seluruh proses politik normatif yang ada serta dengan penuh kedewasaan politik menerima realitas politik dengan lapang dada.

Tindakan politik

Secara terpisah, Bandung Law Information and Study Centre (BLISC) lewat pernyataan sikapnya yang ditandatangani President Director Firman Darajat, S.H., dan sejumlah pengurus lainnya, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung melakukan pengawasan dan mengkritisi segala tindakan politik (*political action*).

Dalam siaran persnya, lembaga kajian hukum dan kemasyarakatan itu mengharapkan, figur yang akan menjadi Wali Kota Bandung 2003-2008 harus mampu menyelesaikan sejumlah masalah dari 27 permasalahan yang perlu menjadi catatan Pemkot Bandung. Sebagian masalah tersebut adalah lalu lintas dan perbaikan jalan, pedagang kaki lima, reklame, dan mall.

Lebih lanjut BLISC menekankan wali kota mendatang harus memiliki akses yang luas dengan masyarakat sebagai *stakeholder*. (A-56/nur/din/nin-job)***

Pembangunannya Dinilai Kedaluwarsa

FKRJ Minta Pembatalan Projek Waduk Jatigede

BANDUNG, (PR)

Ratusan warga dari berbagai desa di Kec. Jatigede Kab. Sumedang mendatangi kantor Gubernur Jabar di Gedung Sate, Kamis (4/9). Warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Jatigede (FKRJ) tersebut meminta agar pemerintah membatalkan rencana pembangunan Waduk Jatigede.

"Kami menuntut rencana itu dibatalkan karena menyengsarakan rakyat," kata Ketua BP-FKRJ Kusnadi Chandrawiguna dalam pernyataannya, ketika perwakilan mereka diterima Agus Gustiar dari Biro Sarana Perekonomian Setda Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Kamis (4/9).

Warga Jatigede, yang datang menggunakan enam truk dan dua minibus itu, menilai pembangunan Waduk Jatigede sudah kedaluwarsa karena direncanakan lebih 26 tahun silam. Saat ini, di lokasi pembangunan waduk yang direncanakan, penduduknya sudah padat sehingga bila dilanjutkan akan menimbulkan problem sosial yang sulit diatasi. "Pembangunan waduk menimbulkan permasalahan yang kompleks. Rencana itu bahkan bertentangan dengan UU Cagar Budaya, karena akan menggusur sejarah Sumedang yang cikal

bakalnya berada di daerah rencana genangan," kata Kusnadi.

Kalaupun rencana pembangunan waduk akan terus dilaksanakan, FKRJ menyarankan agar pembangunannya dipindahkan ke Beureum Benguet Desa Cipasang Kec. Cibugel Kab. Sumedang. "Kami menilai pemindahan lokasi pembangunan waduk ini merupakan solusi yang paling baik," katanya.

Sementara itu, di lokasi pembangunan waduk yang direncanakan sebelumnya, pemerintah harus segera melaksanakan sertifikasi tanah dan bangunan sebagai wujud tanggung jawab masyarakat dalam hal pajak. Begitupun pembangunan sarana dan prasarana di daerah rencana genangan Waduk Jatigede juga perlu secepatnya dipulihkan.

Selama ini, pemerintah daerah melalui SK Gubernur No. 181.1/SK-1267/Pem.Um/1981, yang direvisi melalui SK No. 36 Tahun 2000, melarang pembangunan di daerah tersebut. "Ketentuan itu jelas sangat bertentangan dengan hak asasi manusia," katanya.

Agus Gustiar berjanji untuk menyampaikan aspirasi warga yang tergabung dalam FKRJ kepada gubernur. Dia juga meminta perwakilan FKRJ hadir dalam

pertemuan gubernur dengan para pejabat pemerintah pusat. Pertemuan membahas rencana pembangunan Waduk Jatigede itu dijadwalkan berlangsung di Gedung Sate, Jumat (5/9).

Gusur lahan subur

Rencana pembangunan Waduk Jatigede, menurut Kusnadi pula akan menggusur lahan pertanian subur yang seharusnya dilindungi. Hal itu sesuai Tap MPR No. IX/MPR/2001, Kepres No. 3 tahun 2003, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 - XII tahun 2003 dan UUPA No. 5 tahun 1961.

"Untuk mengairi lahan pertanian yang kekeringan, tidak bera harus menenggelamkan tanah pertanian. Apalagi, sampai menggusur sekira 7.116 keluarga penduduk yang selama ini tinggal di wilayah rencana genangan waduk," ujarnya.

Apabila dipaksakan, dia khawatir pembangunan waduk akan menimbulkan berbagai ketidakpuasan masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas keamanan. Apalagi, proses pendataan dan pemberian ganti rugi kepada masyarakat sejak s.d. 1996 dinilai cacat hukum, karena prosesnya menyimpang dari undang-undang dan perundang-undangan (42/Nur-job)***

Mereka Menolak SK Dirut PT DI Program Pengrumahan

Karyawan PT DI "Serbu" DPRD

NDUNG, (PR).-

Ribuan karyawan PT Dirgantara Indonesia yang tergabung dalam Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan (SP FKK) "menyerbu" DPRD Jabar di Jln. Diponegoro, No. 12/8. Mereka kembali menyampaikan penolakannya terhadap SK Dirut PT DI No. SP/0598/030.02/PT/UT0000/07 tentang Program Pengrumahan Karyawan PT DI. Terlebih Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Jacob Nuwaweca meminta agar SK tersebut segera di-

tolak. Selain itu, SP FKK menilai keputusan SK Dirut tersebut tidak konsisten. Dalam poin 3 disebutkan bahwa program pengrumahan akan diberikan 6 bulan sejak tanggal ditetapkan. Artinya, karyawan akan dianggij untuk bekerja setelah 6 bulan. Bila ada karyawan yang dianggij untuk bekerja sebelum 6 bulan, berarti pemanggilan tersebut

melanggar keputusan pengrumahan itu sendiri.

Untuk itu, SP FKK meminta kepada seluruh anggotanya agar tidak mengindahkan dan/atau menolak panggilan pihak Direktur Utama (Dirut) PT DI untuk kembali masuk kerja sampai pihak Dirut mencabut keputusan pengrumahan karyawan. Bagi mereka yang tidak mengikutinya, pengurus SP FKK akan menjatuhkan sanksi, bahkan dipecat dari keanggotaan SP FKK.

SP FKK juga meminta kepada seluruh anggotanya agar tetap bersama-sama memperjuangkan hak-hak karyawan berdasarkan kebenaran dan keadilan di bawah koordinasi SP FKK serta menjaga solidaritas, persatuan dan kesatuan. SP FKK menilai SK Dirut melanggar UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU

No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Kepmen No. 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN.

Konvoi

Unjuk rasa yang berlangsung di halaman luar DPRD Jabar kemarin berlangsung aman dan tertib. Mereka meminta agar DPRD dan Gubernur Jabar memerhatikan nasib para karyawan PT DI. Salah satunya, dengan melayangkan surat kepada pemerintah pusat agar permasalahan PT DI cepat diselesaikan dan tidak berlarut-larut.

Jika suara mereka tidak didengarkan oleh DPRD dan Gubernur Jabar, mereka mengancam akan melakukan unjuk rasa yang lebih besar lagi. Terlebih mereka menganggap bahwa persoalan yang terjadi di PT DI sudah bermuansa politik

sehingga sulit untuk segera diselesaikan. Hal itu terlihat dari adanya perlakuan diskriminatif antara karyawan yang masih bekerja dan yang dirumahkan. Karyawan yang dirumahkan tidak dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang pernah diberikan oleh PT DI sebelum mereka dirumahkan.

Setelah menyampaikan aspirasinya, ribuan karyawan yang mengendarai sepeda motor dan mobil, kembali ke PT DI dengan cara berkonvoi. Akibatnya, arus lalu lintas yang dilewati iring-iringan kendaraan tersebut menjadi macet. Seperti di Jln. Supratman, Jln. A. Yani, Jln. Asia-Afrika, dan Jln. Sudirman. Bahkan, petugas kepolisian sempat menutup iring-iringan tersebut di depan Alun-alun Bandung. Namun, beberapa saat kemudian, petugas mengizinkan ribuan karyawan melanjutkan konvoi untuk menuju PT DI. (A-115/Nur-job)***



63

Pikiran Rakyat

24 JUMAD

Mahasiswa Tolak "Money Politics"

Dewan Mesti Disumpah tak Lakukan Praktik Politik Uang

BANDUNG, (PR).-

Tujuh perwakilan senat mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, dan himpunan mahasiswa dari perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) di Bandung mengelompokkan pernyataan sikap sebagai reaksi dari dugaan *money politics* dalam pemilihan wali kota (pilwalkot) Bandung. Mereka yang tergabung dalam Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (Ismahi) Wilayah V Jawa Barat mengimbau DPRD Kota Bandung agar melakukan sumpah tidak melakukan perbuatan *money politics*.

Imbauan dan tuntutan tersebut tertuang dalam empat butir pernyataan sikap mereka. Koordinator Ismahi Wilayah V Jawa Barat, Yoga Rahadiansyah mengatakan pencalonan figur bakal calon dari tiap fraksi sesungguhnya merupakan proses representasi kepentingan publik dan bukan hasil *money politics*.

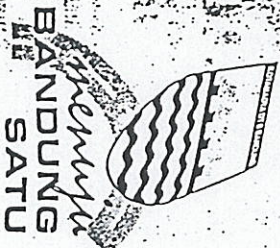
Oleh karena itu, Ismahi menuntut setiap fraksi agar dapat memberikan penjelasan mengenai figur yang dicalonkan sehingga terdapat suatu transparansi mengenai bakal calon yang diajukan fraksi. Mereka juga menuntut DPRD Kota Bandung agar melaksanakan pilwalkot dengan mekanisme voting terbuka sehingga dapat meningkatkan praktik *money politics*.

Yoga menegaskan pilwalkot Bandung ini adalah momentum awal menuju perubahan Kota Bandung saat ini. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, perwujudan pemerintahan yang kuat dan penuh *good governance* menjadi kewajiban utama dalam pengujian kembali Kota Bandung sesuai dengan cita-cita masyarakat.

Fenomena praktik suap yang selama ini terjadi harus segera diatasi sesuai dengan semangat visi reformasi yang mendasari pemerintahan KKN.

Ismahi menilai pilwalkot ini sangat rentan terhadap *money politics*. Permasalahan ini timbul sebagai akibat dari tidak adanya proses transparansi publik terhadap mekanisme penjuragan dan pemilihan kepala daerah. Padahal, transparansi merupakan prinsip dasar terciptanya *good governance*. Dengan proses ini, masyarakat dapat berperan sebagai kontrol terhadap proses pemilihan dan akuntabilitas DPRD Kota Bandung dapat ditunjukkan.

Sementara itu, Panguyan Pausundan Kota Bandung menyampaikan terima kasih kepada partai yang tidak lagi egois memperjuangkan partai, tetapi memperjuangkan warga Bandung. "Kami menyampaikan penghargaan selagi inggi-tinggi atas *stili etelan*



dan *stili simbeuh ku kudeudeuh ingta ku kanyah papada Ki Simdi* hingga tak terjadi hal-hal yang *ri-welut dan agawirwelut*," ujar Kabid Organisasi T. Subaryah Sumdikara kepada "PR".

Menurut dia, apa pun alasannya, tidak harus ada kalah-menang dalam pilwalkot Bandung. Pasalnya, yang menang pada akhirnya haruslah hati nurani orang Bandung sendiri sebagai teladan kehidupan ke depan.

Semua yang menkrissal menjadi iklim kondusif seperti ini di Kota Bandung antara lain karena petan besar anggota dewan. Jika ada beda ekspresi dan apresiasi, sebenarnya layak kita pahami sebagai filter, rambu-rambu atau isyarat kegagalan yang sebenarnya sama-sama *mikanyah* Kota Ban-

dung. Yang terjadi kemudian, ekspresi ekspresi yang timbul dan ditimbulkan tidak pernah mencuat jadi kebencian yang mengumpul dalam bentuk konflik horizontal."

Agar kemulusan dan kearifan proses pilwalkot yang telah berjalan selama ini tidak tercela, Subaryah mengimbau agar semua pihak mengartikan kembali kebersamaan menuju ke satu titik akhir yakni mengabdikan untuk *ju-cung agung* Kota Bandung yang makin *halung*. Hal itu hanya mungkin terjadi dan dapat diwujudkan jika semua anggota dewan dan semua pihak mampu merepresentasikan harapan mayoritas warga Kota Bandung.

Fair
DPC Partai Pelopor Kota Bandung mengharuskan ketiga pasangan kandidat dapat bersaing secara sehat dan *fair*, tanpa harus menimbulkan gejolak yang kontraproduktif di tengah masyarakat.

"Satu hal mendasar yang perlu dilakukan oleh wali kota terpilih adalah konsolidasi dan rasionalisasi birokrasi di tubuh Pemkot Bandung," kata ketuanya, Fidel Gawa Junat (22/8).
Dikatakan, di antara tiga pilar rezim Orde Baru, tinggal birokrasi lah yang belum melakukan reformasi internal, sehingga penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinyatakan sebagai musuh utama kaum reformis masih terus berlangsung dan bahkan semakin parah karena kalangan legislator juga diayak ikut serta. "Untuk itu, Partai Pelopor menggariskan agenda penataan birokrasi pemkot kepada siapapun wali kota terpilih, sehingga meniadakan korupsi dapat segera dipangkas," ujar Fidel.

Dalam penilaiannya, wali kota ataupun wakil wali kota adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemkot yang harus memiliki jarak yang sama terhadap semua aparatur birokrasi. Terlebih saat ini adanya isu yang merebak, bahwa dalam proses pilwalkot kali ini ada kecenderungan kubu-kubuan di antara aparat birokrasi.
Pada prinsipnya semua visi, misi dan program yang ditawarkan oleh para kandidat dalam proses penjuragan calon wali kota/ Wakil Wali Kota secara teknis berada di tangan aparat birokrasi. Oleh sebab itu sekali lagi DPC Partai Pelopor Kota Bandung memandang perlu melakukan konsolidasi dan bahkan ke-mungkian rasionalisasi birokrasi merupakan langkah yang harus dilakukan oleh wali kota/ wakil wali kota yang terpilih kelak. (A-56/A-89/dm-job/jatwo-job) 9533

BANDUNG (PR).

Karyawan PT Di Kabupaten Bandung (PT DI) telah berdialog dengan Gubernur Jawa Barat Soedjatmaja, Sabtu (25/8). Dengan mendengarkan keluhan-keluhan mereka sebagai pemukiman padat penduduk, Gubernur Soedjatmaja didampingi Ketua DPRD Jabar H. Saifuddin berdialog dengan ribuan karyawan PT DI yang ada di berbagai desa di Kabupaten Bandung.

Perwakilan karyawan PT DI yang hadir dalam dialog tersebut adalah Ikatan Keluarga SUTET (IKKS) yang diketuai oleh H. Saifuddin. Mereka menyampaikan keluhan-keluhan mereka kepada Gubernur Soedjatmaja dan Ketua DPRD Jabar H. Saifuddin.

Salah satu keluhan yang disampaikan oleh karyawan PT DI adalah mengenai masalah pemukiman yang sempit dan padat penduduk. Mereka juga mengeluhkan masalah kesehatan dan lingkungan hidup di sekitar pemukiman mereka.

Gubernur Soedjatmaja dan Ketua DPRD Jabar H. Saifuddin merespon keluhan-keluhan tersebut dengan menjanjikan akan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi pemukiman karyawan PT DI. Mereka juga akan melakukan koordinasi dengan pihak PT DI untuk memperbaiki kondisi pemukiman tersebut.

Perwakilan karyawan PT DI yang hadir dalam dialog tersebut adalah Ikatan Keluarga SUTET (IKKS) yang diketuai oleh H. Saifuddin.

Warga Korban SUTET Datangi DPRD

BANDUNG, (PR).

Puluhan warga dari 11 desa di Kecamatan Rancaekek, Solokan Jeruk, Ciparay, dan Anjarsari yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Korban SUTET (IKKS) mendatangi Gedung DPRD Bandung, Senin (25/8). Mereka menuntut PT PLN agar mengembalikan hak-hak warga yang dirugikan akibat pembangunan jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi). IKKS juga meminta PLN memberikan ganti rugi kepada warga yang menjadi korban SUTET.

Menurut Koordinator IKKS, Ujang Syarifudin, S.Ag., kasus SUTET di Kabupaten Bandung pembangunan jaringan SUTET 500 kv Jawa-Bali-Nusa Tenggara berdasarkan surat kepala staf Administrasi dan Keuangan Perusahaan listrik Negara No. M.259/SAK/1982, tertanggal 30 Juni 1982, tentang pemotongan tegangan selebar 1 meter

yang ditujukan kepada Kepala Desa Haur Pugur Kecamatan Rancaekek, telah banyak merugikan warga.

Dampak dari proyek tersebut telah menimbulkan korban lebih dari 1.000 kepala keluarga (KK) di desa-desa yang dilalui jaringan SUTET. Lebih mengkhawatirkan lagi telah jatuh korban jiwa karena terkena sengatan arus tegangan tinggi tersebut.

"Selain itu, muncul berbagai penyakit seperti ISPA (infeksi saluran pernapasan akut), kanker, kerusakan barang elektronik, dan gangguan psikologis lainnya yang menimpa masyarakat di sekitar SUTET", ujarnya.

Ia menambahkan bahwa jaminan pihak PT PLN yang menyatakan jaringan SUTET aman dan tidak berbahaya serta adanya jaminan apabila di kemudian hari terjadi kecelakaan maka pihak PT PLN akan bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Akan tetapi, kenyataannya

jaminan pihak PT PLN itu tidak benar, bahkan pihak PT PLN selalu berkelit ketika warga meminta pertanggungjawaban. "Padahal, jelas warga yang menjadi korban akibat dari jaringan SUTET yang melintasi desa-desa warga", ungkapnya.

Lebih lanjut Ujang menegaskan bahwa kebijakan politik yang dijalankan pemerintahan Orde Baru bagi rakyat kecil telah menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan. Hal ini disebabkan implementasi dari kebijakan tersebut lebih mengutamakan aspek pertumbuhan dari pada aspek keadilan terutama bagi rakyat kecil.

Akibatnya, rakyat kecil selalu terpinggirkan oleh kepentingan pengusaha-pengusaha besar yang berkolaborasi dengan penguasa Orba. "Jadi salah satu kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan adalah korban SUTET ini," tegasnya. (Nurdin-job)**

Warga Persoalkan Operasi "Wanalaga" di Kertasari

BANDUNG, (PR).

Belasan warga Desa Tarumajaya dan empat desa lain di Kec. Kertasari Kab. Bandung mendatangi DPRD Jabar, Selasa, (2/9). Didampingi kuasa hukum dari LBH Bandung, para petani penggarap itu mempersoalkan pelaksanaan Operasi Wanalaga yang berlangsung di wilayah Kec. Kertasari. Mereka juga berharap dewan memperjuangkan surat izin menggarap tanah perkebunan di kawasan itu yang saat ini kondisinya telantar.

"Seyogianya Operasi Wanalaga diarahkan pada aktor-aktor yang diidentifikasi Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) sebagai aktor-aktor yang diduga terlibat perusakan kawasan hutan di Jabar, bukan kepada para petani penggarap," kata Gatot Rianto dari LBH Bandung ketika diterima Wakil Ketua Komisi A, Makki Juliawan dan beberapa anggota dewan lain.

Para petani di Desa Tarumajaya pada umumnya petani yang tidak memiliki lahan, tinggal di sekitar kawasan hutan Blok Haruman, Cibuluh, Sapuluh, dan Blok Grogol. Sejak sepuluh tahun lalu, kondisi lahan di kawasan itu gundul.

Selama enam tahun mengelola lahan tersebut, nyaris tidak ada larangan. Baru sekira empat tahun belakangan, pihak Perhutani mengajak para petani penggarap bermi-

tra. Pihak Perhutani mewajibkan petani menanam dan merawat tanaman pinus miliknya dengan imbalan petani dapat bercocok tanam secara tumpangsari di sela-sela tanaman pinus tersebut.

Kendati demikian, mereka dengan berat hati meninggalkan lahan-lahan garapannya begitu mendingar adanya SK gubernur yang meminta pemda dan semua instansi terkait melakukan upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan di Jabar. "Namun, yang membuat masyarakat khawatir karena setelah itu ada beberapa di antara mereka yang dipanggil pihak kepolisian dan dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana diatur UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999," katanya.

Oleh karena itu, melalui kuasa hukumnya, para petani penggarap meminta agar pemanggilan oleh pihak kepolisian dihentikan. Mereka juga berharap bisa mendapatkan izin menggarap lahan perkebunan Cikembang yang sejak 15 tahun lalu kondisinya telantar. Lokasi perkebunan itu berdampingan dengan Desa Tarumajaya. "Kami berharap dewan dapat memfasilitasi rapat-rapat koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk menajaki kemungkinan adanya izin menggarap lahan perkebunan telantar itu," kata Gatot Rianto. (A-42/Nur-job)***

PA yang Amanah Beri Kontribusi Signifikan

BANDUNG, (PR)

Kehadiran pengadilan agama yang amanah, memegang teguh kebenaran dan keadilan, berlandaskan syariat agama akan memberikan kontribusi signifikan dalam menata dan memelihara kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat yang berkualitas. "Pengadilan agama akan menjadi institusi yang memiliki peran strategis dalam ikut mendorong kehidupan sosial di Jabar yang berkualitas melalui penegakan hukum agama, khususnya agama Islam," kata Gubernur Danny Setiawan pada acara serah terima Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jabar dari pejabat lama Nawawi Ali kepada Khalilurrahman di Ruang Sidang DPRD Jabar, Selasa (2/9) pagi.

Di samping edukasi sosial dan penegakan hukum, gubernur juga menyebutkan faktor lain yang sangat penting bagi pembentukan karakter masyarakat berakhlakul karimah yaitu

keteladanan para pemimpin, baik pemimpin formal maupun informal. Oleh karena itu, gubernur juga mengajak segenap komponen masyarakat Jabar menjalankan ketiga dimensi peningkatan kualitas kehidupan sosial tersebut.

"Jajaran pengadilan agama akan memegang peran sentral dalam upaya penegakan hukum. Sedangkan komponen lain, mari bersama-sama menjalankan upaya edukasi sosial dan contoh keteladanan," tuturnya.

Gubernur berharap, pembinaan kehidupan sosial berakhlakul karimah menjadi prioritas bersama. Bagaimanapun disadari, permasalahan dan kerusakan di dalam tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan hidup saat ini berakar dari lemahnya akhlak sosial. "Banyak persoalan yang akan dapat diselesaikan jika kualitas akhlak dan kesalehan sosial di Jabar dapat diwujudkan," katanya. (A-42/Nur-job)***



Gubernur Jawa Barat

S A M B U T A N
GUBERNUR JAWA BARAT
PADA ACARA
PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS
UNIT SANDI DAN TELEKOMUNIKASI
SE JAWA BARAT

HARI/TANGGAL : RABU, 20 AGUSTUS 2003
WAKTU : 08.00 WIB
TEMPAT : HOTEL PERMATA INTERNASIONAL
JL. LEMAH NEUNDEUT NO. 7 BANDUNG

ASSALAMU 'ALLAIKUM WR.WB.

- ASS. IV SETDA PROP JAGAR ; - KA BIRD LIMUM.

SAUDARA PESERTA RAPAT KOORDINASI TEKNIS
UNIT SANDI DAN TELEKOMUNIKASI SE JAWA BARAT
SERTA SELURUH TAMU UNDANGAN YANG SAYA
HORMATI.


PUJI SYUKUR SENANTIASA KITA PANJATKAN KE
KHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, YANG TELAH
MEMBERIKAN RAHMAT DAN KARUNIANYA SEHINGGA
KITA DAPAT BERKUMPUL BERSAMA DALAM RANGKA
RAPAT KOORDINASI TEKNIS UNIT SANDI DAN
TELEKOMUNIKASI SE JAWA BARAT.

SE JAWA BARAT MERUPAKAN MOMENTUM YANG SANGAT TEPAT UNTUK MEMBAHAS BERBAGAI PERMASALAHAN TERMASUK PENYELENGGARAAN DAN PENYAMPAIAN ARUS INFORMASI PEMILU 2004 SESUAI DENGAN KAPASITAS SAUDARA - SAUDARA YANG BEKERJA PADA JAJARAN UNIT SANDI DAN TELEKOMUNIKASI. DENGAN HARAPAN, SEMOGA RAKONTEK SANDI DAN TELEKOMUNIKASI INI DAPAT BERJALAN LANCAR, PERHASI DAN BERDAYA GUNA SERTA EFEKTIF EFISIEN.

AKHIRNYA SAYA UCAPKAN SELAMAT MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI TEKNIS UNIT SANDI DAN TELEKOMUNIKASI SE JAWA BARAT DAN PADA KESEMPATAN INI PULA DENGAN MENGUCAP BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM, SECARA RESMI RAPAT KOORDINASI TEKNIS UNIT SANDI DAN TELEKOMUNIKASI SE JAWA BARAT, SAYA BUKA.

WASSALLAMU 'ALLAIKUM WR.WB.

GUBERNUR JAWA BARAT
WAKIL,



NUMAN A. HAKIM



Gubernur Jawa Barat

**SAMBUTAN GUBERNUR JAWA BARAT
PADA PELEPASAN CALON PRAJA DAN ALUMNI
PRAJA STPDN ASAL PROPINSI JAWA BARAT
TAHUN 2003**

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 26 AGUSTUS 2003
PUKUL : 09.00 WIB
TEMPAT : AULA BARAT GEDUNG SATE

BISSMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM.

ASSALAMUALAIKUM WR. WB.

KA. DINAS SOSIAL ; KA. RD KEPEGAWAIAN

HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA SERTA
PARA CALON PRAJA DAN PAMONG PRAJA MUDA
LULUSAN STPDN YANG KAMI BANGGAKAN.

SEGENAP PUJI DAN SYUKUR KITA PERSEMBAHKAN
KE HADIRAT ALLAH SWT, BAHWA ATAS PERKENAN-NYA
PADA ^{PAGI} ~~MALAM~~ HARI INI KITA DAPAT BERKUMPUL DAN
BERSILATURAHMI GUNA MENGIKUTI ACARA RAMAH
TAMAH : DALAM RANGKA PEMBEKALAN BAGI CALON
PRAJA DAN MALAM PENGANTAR TUGAS BAGI ALUMNI

PRAJA STPDN TAHUN 2003 ASAL DAERAH PENDAFTARAN
PROPINSI JAWA BARAT.

BAGI PARA CALON PRAJA, MESKIPUN BESOK
KALIAN MASIH HARUS MENEMPUH SELEKSI TAHAP AKHIR
BERUPA PANTUKHIR DI STPDN JATINANGOR, NAMUN
KAMI BANGGA BAHWA KALIAN YANG SAAT INI
BERJUMLAH 53 ORANG MERUPAKAN PUTRA-PUTRI
TERBAIK HASIL SARINGAN YANG SANGAT KETAT.

DENGAN DEMIKIAN SUDAH SEPATUTNYA SAUDARA-
SAUDARA BERSYUKUR KEPADA ALLAH SWT KARENA
HANYA ATAS PERKENAN-NYA, KALIAN TELAH
DIMUNGKINKAN UNTUK LULUS DALAM SEKIAN KALI
SARINGAN DAN MAJU PADA SARINGAN BERIKUTNYA.
RASA SYUKUR TERSEBUT PERLU DIWUJUDKAN DENGAN
CARA MENGIKUTI PANTUKHIR DENGAN SINGUH-SINGUH
DAN PENUH RASA TANGGUNG JAWAB.

PANITIA DAERAH DAN TENTUNYA PULA PANITIA
PUSAT DARI JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
TELAH BERUPAYA, AGAR SETIAP PESERTA SELEKSI

YANG LULUS PADA SETIAP TAHAP SELEKSI BETUL-BETUL PESERTA YANG MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN POTENSI DAN KEMAMPUANNYA SENDIRI, TANPA ADANYA INTERVENSI DARI PIHAK MANAPUN. KARENA ITU KAMI PUN BERHARAP DALAM MENGIKUTI PANTUKHIR SAUDARA-SAUDARA HARUS PERCAYA SEPENUHNYA KEPADA KEMAMPUAN DIRI SENDIRI.

TENTU KITA SEMUA BERHARAP KALIAN SEMUA DAPAT DITERIMA MENJADI PRAJA STPDN KARENA UNTUK TUJUAN ITULAH KALIAN MENGIKUTI SELEKSI INI, NAMUN JIKA TOH NANTINYA ADA DIANTARA KALIAN YANG TIDAK DAPAT MELANJUTKAN PENDIDIKAN SEBAGAI PRAJA STPDN, KAMI INGATKAN BAHWA HAL ITU BUKAN BERARTI KEGAGALAN SAUDARA-SAUDARA. ATAU KALAU PUN HAL ITU DIANGGAP KEGAGALAN, INGATLAH BAHWA BAGI ORANG YANG BERJIWA TEGUH DAN PANTANG PUTUS ASA KEGAGALAN ITU SEMATA-MATA HANYALAH KEBERHASILAN YANG TERTUNDA. ARTINYA, MASIH ADA KESEMPATAN LAIN DI MASA DATANG UNTUK KITA MENCOBA DAN MENCOBA LAGI.

TAQWA JAWA BARAT SEBAGAI PROPINSI TERMAJU DAN MITRA TERDEPAN IBUKOTA NEGARA TAHUN 2010".

DENGAN MEMPERHATIKAN SISA WAKTU YANG TERSEDIA, DALAM LIMA TAHUN KE DEPAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT MENCANANGKAN KEBIJAKAN UNTUK MELAKUKAN AKSELERASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT GUNA Mendukung PENCAPAIAN VISI TERSEBUT DI ATAS.

ADA DUA AGENDA UTAMA DALAM MELAKUKAN AKSELERASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, YAKNI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERUTAMA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN SERTA AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN KHUSUSNYA MELALUI PERLUASAN LAPANGAN KERJA DAN MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI JAWA BARAT.

UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN DUA AGENDA UTAMA TERSEBUT PERLU DIDUKUNG OLEH PEMANTAPAN

KINERJA PEMERINTAH DAERAH AGAR DAPAT MENJADI KATALISATOR PEMBANGUNAN, SERTA IMPLEMENTASI KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN AGAR DARI ASPEK DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT DAPAT BERJALAN SECARA SERASI, SEIMBANG DAN BERKELANJUTAN.

TERAKHIR NAMUN YANG PALING ESENSIAL ADALAH PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL YANG BERLANDASKAN AGAMA DAN NILAI LUHUR BUDAYA DAERAH. DALAM KAITAN INI KITA INGIN MENGEMBANGKAN KONSEP KESALEHAN SOSIAL, DIMANA SEGENAP MASYARAKAT JAWA BARAT YANG DIKENAL RELIGIUS DAN BERBUDAYA LUHUR INI DIHARAPKAN DAPAT MEREKLEKSIKAN SETIAP AJARAN AGAMA DAN NILAI LUHUR BUDAYANYA, DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.

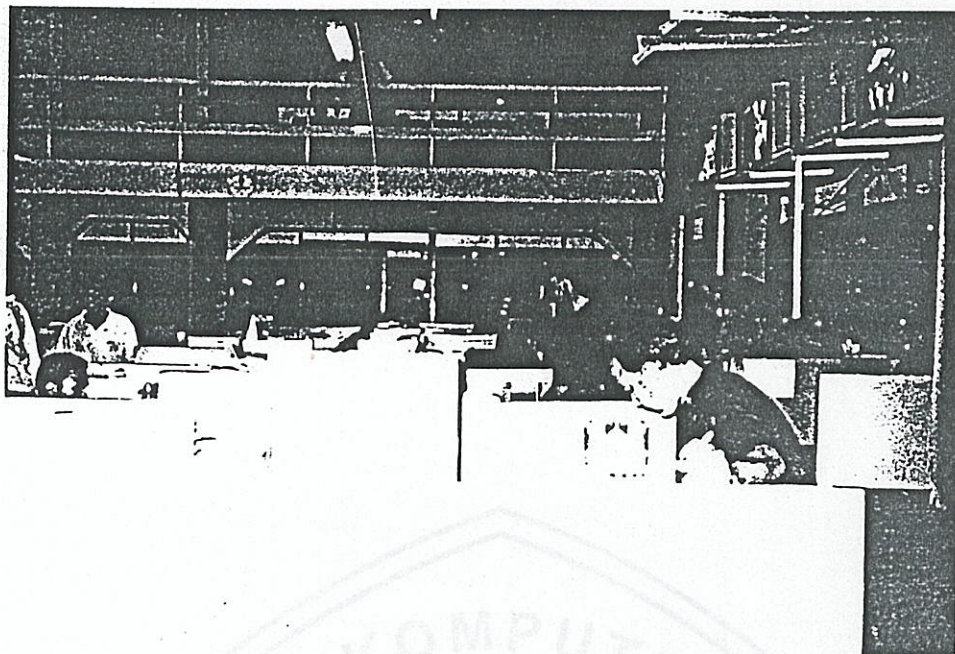
DIANTARA KALIAN ADA YANG AKAN BERTUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DAN SEBAGIAN BESAR AKAN BERTUGAS DI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT. UNTUK ITU SAYA BERHARAP KALIAN DAPAT MEMAHAMI VISI DAN MISI

PEMBANGUNAN JAWA BARAT DI ATAS, KARENA VISI DAN MISI DI ATAS HANYA DAPAT TEWUJUD JIKA TERDAPAT SINERGI ANTARA KINERJA PEMERINTAH PROPINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SERTA PRATISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA.

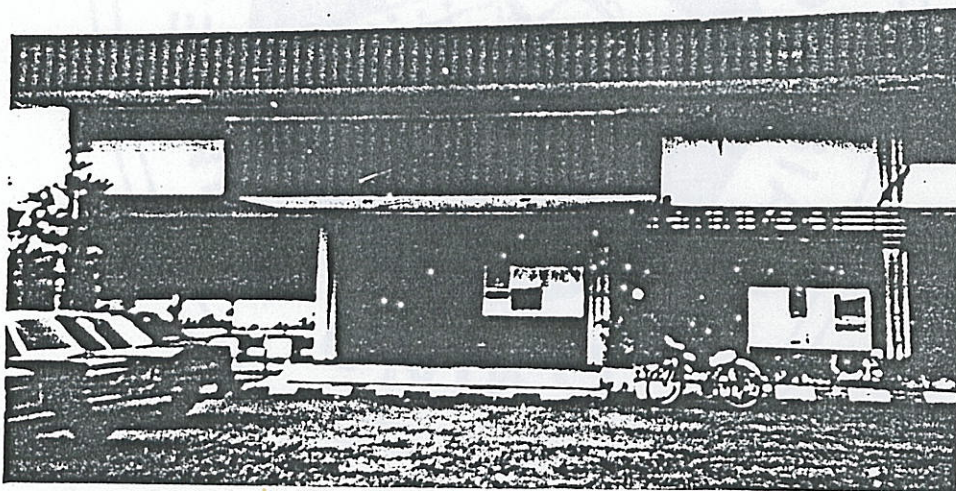
DENGAN WAWASAN NASIONAL YANG TERTANAM KUAT DALAM JIWA DAN PIKIRAN KALIAN SELAMA MENKUTI PENDIDIKAN DI STPDN, SAYA BERHARAP KALIAN MENJADI UNSUR PEREKAT DI TENGAH ERA OTONOMI DAERAH YANG KADANG KALA MENIMBULKAN EKSES MENINGKATNYA EGO KEDAERAHAN YANG BERLEBIHAN.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI.

DEMIKIAN HAL-HAL YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN. SELAMAT BERJUANG DAN SELAMAT BEKERJA, SELANJUTNYA DENGAN UCAPAN "BISSMILLAHIRROHMAANIRROHIIM" DENGAN RESMI SAYA LEPAS CALON PRAJA STPDN YANG AKAN MENGIKUTI PANTUKHIR DAN ALUMNI PRAJA STPDN YANG AKAN BERTUGAS DI WILAYAH JAWA BARAT. SEMOGA ALLAH SWT



Ruang kerja Redaksi Harian Umum Pikiran Rakyat



Kantor Redaksi Harian Umum Pikiran Rakyat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA PRIBADI**

Nama : NURDIN
Tempat Tgl Lahir : Bogor, 28 September 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Anak Ke : 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara
Alamat : Jl. Raya Parung No. 186 Bogor
Telephon : (0251) 612933

PENDIDIKAN

Alumnus 1990 : TK JAMPANG
Alumnus 1991 : SDN JAMPANG III
Alumnus 1997 : SMPN 6 BOGOR
Alumnus 2000 : SMU YZA 2 BOGOR

PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI :

1. Pelatihan Jurnalistik di Unikom
2. Pelatihan Investigative Reporting di Hotel Panghegar
3. Seminar Media Wacch di Hotel Permata International